

## **ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KOTA KOTAMOBAGU**

**<sup>1</sup>Harry Al Makka, <sup>2</sup>David P.E. Saerang, <sup>3</sup>Inggriani Elim**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
Email: [almakkaharry777@gmail.com](mailto:almakkaharry777@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. Objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas PPKAD. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi.*

*Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian, dimana pada analisis keserasian dilakukan analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efisiensi belanja, diketahui bahwa kinerja belanja terhadap.*

### **ABSTRACT**

*Budget Realization Report (LRA), which published the local government to provide information that is useful to assess the financial performance area. Therefore, the LRA became one financial accountability reports main areas. The LRA is based on the readers can make the analysis of the performance of the financial statements of the analysis of income, expenditure analysis, and financial analysis. Expenditure in the Budget Realization Report is an essential component. Shopping areas reflect the policy of the local government and regional development direction. Shopping is a decrease in assets or increase in debt used for various activities in the accounting period. The object of research is the Department of Revenue Finance and Asset Management at Kotamobagu. The research objective was to analyze the performance of expenditures in the Budget Realization Report (LRA) at the Department of PPKAD.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang.

Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan dan kesehatan. Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-undang No.1 tentang perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis dan pembiayaan. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kotamobagu. Dinas PPKAD dipilih sebagai objek karena sebagai badan atau instansi yang mengelolah keuangan daerah baik itu pendapatan maupun belanja serta dinas PPKAD menyajikan laporan secara umum dari Pemerintah Kotamobagu.

### 1.2 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui kinerja belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKAD) di Kotamobagu dari Tahun Anggaran (TA) 2013-2014.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akuntansi

Menurut American Accounting Association, Statement of Accounting Theory. “Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut”.

### 2.2 Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. akuntansi keuangan daerah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah daerah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan.

### 2.3 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur-prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (Baridwan, 2004 : 3).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dimana besarnya disesuaikan, diatur dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semuanya sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi keuangan daerah.

### 2.4 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu berdasarkan pada prinsip-prinsip menurut Devas, dkk (2000:279-280) adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung Jawab (*accountability*)  
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan  
Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

- c. Kejujuran  
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)  
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- e. Pengendalian  
Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat dipercaya.

## 2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah, berasal dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Dana Perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

## 2.6 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dalam penelitian ini mengambil data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana penulis melakukan penelitian langsung di objek penelitian dengan mengambil data berupa Laporan Realisasi anggaran dan juga didukung dengan literature-literatur yang relevan dengan variable-variabel yang akan diteliti.

#### **3.2 Tempat dan Waktu**

Tempat yang menjadi objek penelitian dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan sejak Agustus-September.

#### **3.3 Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menguraikan hasil analisis dari belanja serta bagaiman kinerjanya terhadap LRA.

#### **3.4 Definisi Operasional**

Beberapa defenisi operasional yang ada dibahas atau dianalisi dalam penelitian ini, agar ada batasan atau ruang lingkup yang dibahas lebih terarah sehingga sesuai dengan judul yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

a. Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang seara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahu anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah merupakan laporan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

d. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas PPKAD Pemerintah Kotamobagu adalah merupakan analisis atas hasil kerja dari belanja daerah Pemerintah Kotamobagu dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan alat analisis berupa rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja belanja tersebut.

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Visi :

Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional menuju masyarakat sejahtera, sehat, cerdas, dan berbudaya.

Misi :

- a. Menjadikan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional di kawasan Bolmong Raya berbasis jasa dengan dukungan infrastruktur, pelayanan publik yang memadai, dan didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.
- b. Menjadikan Kota Kotamobagu sebagai pusat peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui program agroindustri, agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
- c. Menjadikan Kota Kotamobagu sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- d. Menjadikan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kultur setempat.
- e. Menjadikan Kota Kotamobagu sebagai kota dinamis dan kreatif yang didukung oleh masyarakat egaliter, menghargai kesetaraan gender, menghormati supermasi hukum, berkeadilan dan demokratis bersendikan *Falsafah Dodandian* Paloko-Kinalang, serta didukung oleh pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *clean Government*.

### 4.2 Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sngat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output dan outcome dari anggaran.

### 4.3 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini analisis pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2013/2014.

**Tabel 4.1**  
**Pertumbuhan Belanja TA 2013/2014**

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2013	Realisasi Belanja Tahun 2014	Pertumbuhan	
			Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>430.758.786.044,00</b>	<b>479.669.347.318,00</b>	<b>48.910.561.274,00</b>	<b>11,35</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>216.624.152.211,00</b>	<b>228.489.292.661,00</b>	<b>11.865.140.450,00</b>	<b>5,47</b>
Belanja Pegawai	201.624.152.211,00	223.142.920.968,00	21.518.768.757,00	10,67
Belanja Subsidi	-	102.000.000,00	102.000.000,00	100
Belanja Hibah	12.305.397.685,00	2.600.000.000,00	(9.705.397.685,00)	(78,87)
Belanja Bantuan Sosial	525.500.000,00	511.250.000,00	(14.250.000,00)	(2,71)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	2.331.229.900,00	2.133.121.693,00	(198.108.207,00)	(8,48)
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>214.134.633.833,00</b>	<b>251.180.054.657,00</b>	<b>37.045.420.824,00</b>	<b>17,30</b>
Belanja Pegawai	26.869.565.500,00	24.202.961.488,00	(2.666.604.012,00)	(9,92)
Belanja Barang Dan Jasa	71.005.785.378,00	91.461.840.811,00	20.456.055.433,00	28,80
Belanja Modal	116.259.282.955,00	135.515.252.358,00	19.255.969.403,00	16,56
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>430.758.786.044,00</b>	<b>479.669.347.318,00</b>	<b>48.910.561.274,00</b>	<b>11,35</b>

Sumber data: Pemkot Kota Kotamobagu 2015 (diolah)

Dari tabel di atas secara keseluruhan pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 48.910.561.274,00 atau 11,35% dari tahun anggaran 2013. Belanja yang paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah belanja T.A 2014 adalah belanja barang dan jasa yaitu sebesar 28,80%.

#### 4.4 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di dinas PPKAD Kota Kotamobagu berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran T.A 2013 sampai dengan T.A 2014 dengan hasil analisis varians belanja T.A 2013 – T.A 2014 menunjukkan kinerja yang baik, dimana terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif yaitu: T.A 2013 sebesar Rp62.878.387.090,00 atau 12,73% dari total APBD, dan untuk T.A 2014 sebesar Rp82.057.561.018,00 atau 14,60% dari total APBD.

Hasil analisis pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp48.910.561.274,00 atau 11,35% dari tahun anggaran 2013. Belanja yang paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah belanja T.A 2014 adalah belanja barang dan jasa yaitu sebesar 28,80%. Dari hasil analisis keserasian maka dapat diketahui Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melakukan aktifitas belanjanya, tidak hanya memfokuskan belanja pada belanja operasi saja tetapi juga kepada belanja modal. Hanya saja, perbedaan dari kedua aktivitas belanja tersebut adalah aktifitas belanja operasi jauh lebih besar dari pada aktifitas belanja modal. Berikut ini tabel perbandingan antara rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan rasio belanja modal terhadap total belanja:

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Antara Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Kotamobagu**

Tahun Anggaran	Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Selisih
2013	0.5028	0.2698	0.233
2014	0.4763	0.2825	0.1938
<b>Total</b>			0.4268
<b>Rata-rata</b>			0.2134

Sumber data: Pemkot Kotamobagu 2015 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan besarnya selisih dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan rasio belanja modal terhadap total belanja. Dari tabel 4.5 diketahui bahwa besarnya selisih rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan rasio belanja modal terhadap total belanja adalah 0.2134 pertahun. Pada tabel diatas juga dapat dilihat perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal, dimana belanja operasi lebih besar dari belanja modal.

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat mulai T.A 2013 sampai dengan T.A 2014 Pemerintah Kota Kotamobagu dapat melakukan penghematan anggaran. Tahun anggaran 2013 Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan penghematan anggaran sebesar 12.73%, tahun anggaran 2014 sebesar 14.60%.

Keseluruhan penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Kotamobagu, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran T.A 2013 sampai T.A 2014 masing-masing adalah sebagai berikut: T.A 2013 realisasi belanja sebesar 87.26% dan T.A 2014 sebesar 85.40% dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah yang baik yaitu dengan adanya efisiensi belanja untuk tahun anggaran 2013 sebesar 12.73% dan tahun anggaran 2014 sebesar 14.60%. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal menunjukkan kinerja yang baik, dimana terdapat efisiensi yang memadai terlebih lagi untuk tahun anggaran 2013. Pada tabel 4.5 menunjukkan presentase belanja operasional lebih besar dari total belanja daerah dibandingkan dengan belanja modal. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu lebih memprioritaskan dananya pada beanja operasi dibandingkan belanja modal.

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Sebagai daerah di negara berkembang, peranan Pemerintah Kota untuk memacu pelaksanaan pembangunan relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Kotamobagu.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan evaluasi maka dapat di rangkumkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari analisis varians belanja dapat diketahui bahwa kinerja belanja Pemerintah Kota Kotamobagu dari T.A 2013 sampai dengan T.A 2014 menunjukkan kinerja yang baik.
- b. Dari analisis hasil pertumbuhan belanja T.A 2013/2014 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja. Belanja yang paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah belanja adalah belanja barang dan jasa.
- c. Dari hasil analisis keserasian maka dapat diketahui Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melakukan aktifitas belanjanya, tidak hanya memfokuskan belanja pada belanja operasi akan tetapi juga kepada belanja modal. Hanya saja, perbedaan dari kedua aktifitas belanja tersebut adalah aktifitas belanja operasi jauh lebih besar dari pada aktifitas belanja modal. Besarnya selisih rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan rasio belanja modal terhadap total belanja adalah 0.2134% pertahun.
- d. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat T.A 2013 sampai T.A 2014 Pemerintah Kota Kotamobagu dapat melakukan penghematan anggaran. Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan penghematan anggaran sebesar 12.73%, tahun anggaran 2014 sebesar 14.60%.
- e. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran T.A 2013 sampai dengan T.A 2014 masing-masing adalah sebagai berikut: T.A 2013 realisasi belanja sebesar 87.26% dan T.A 2014 sebesar 85.40% dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah yang baik yaitu dengan adanya efisiensi belanja untuk tahun anggaran 2013 sebesar 12.73% dan tahun anggaran 2014 sebesar 14.60%. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal menunjukkan kinerja yang baik, terdapat efisiensi yang memadai terlebih lagi untuk tahun anggaran 2013.

### 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang ada amak dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi dinas PPKAD secara khusus dan Pemerintah Kota kotamobagu agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas, produktifitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
- b. Perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Kota Kotamobagu terhadap belanja modal, karena dengan belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang dan memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
- c. Sebagai daerah di negara berkembang, peranan Pemerintah Kota untuk memacu pelaksanaan pembangunan relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang

- masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Kotamobagu.
- d. Pemerintah Kota Kotamobagu lebih memprioritaskan dananya pada belanja operasi dibandingkan pada belanja modal. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Kota Kotamobagu terhadap belanja modal, karena dengan belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang dan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
  - e. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum.
  - f. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti kinerja belanja secara lebih rinci terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta 2006.
- Darise, Nurlan, *Akuntansi Keuangan Daerah*, PT. Indeks, Jakarta 2008
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standart Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta 2006.
- Gideon Tri Budi Susilo, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris Di Propinsi Jawa Tengah)*, Konfrensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 2007.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta 2007.
- Ibnu Subianto, *MeTodologi Penelitian Manajemen Dan Akuntansi*, Cetakan Kedua, UPP, UPP Yogyakarta 2000.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta 2009.
- Hadi Setia Tunggal, *Kumpulan Peraturan Keuangan Negara*, Harvarindo 2009.
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Unit PenerbitDan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta 2007.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta 2009.
- Syukriy Abdullah, *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2006.
- Priyo Hari Adi, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kabupaten Dan Kota Se Jawa – Bali)*, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 2006.